

BAB III

PEMBAHASAN

A. Framing Surat Kabar Harian Republika, Jawa Pos, dan Kompas

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, masa pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden berlangsung selama tujuh hari, terhitung mulai tanggal 4 – 10 Agustus 2018. Loker pendaftaran dibuka pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, namun khusus pada hari pendaftaran terakhir yakni tanggal 10 Agustus 2018 loker pendaftarannya dibuka hingga pukul 00.00 WIB. Namun, hingga menjelang ditutupnya pendaftaran Capres-Cawapres 2019 hanya ada dua pasangan calon yang telah resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni dari kubu petahana Jokowi-Amin dan dari kubu oposisi yaitu Prabowo-Sandi. Berikut adalah beberapa berita yang masuk dalam objek analisis yang dimuat dalam SKH Kompas, Jawa Pos, dan Republika edisi jumat, 10 Agustus – 16 Agustus 2019.

1. Framing Republika

Pada tanggal 9 Agustus 2018 tepatnya pada Kamis petang, Presiden pejawat Joko Widodo secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai Calon Presiden 2019 yang didampingi oleh K.H. Ma'ruf Amin sebagai Calon Wakil Presidennya. Sedangkan dari kubu oposisi, Prabowo Subianto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden 2019 dengan didampingi oleh Mantan Wakil Gubernur Jakarta yaitu Sandiaga Salahudin Uno sebagai Calon Wakil Presidennya. Situasi ini lantas tidak luput dari framing beberapa surat kabar Nasional, salah satunya SKH Republika. Tidak tanggung-tanggung, Republika memuat peristiwa politik tersebut sebagai

headline pemberitaannya yang hampir memenuhi satu halaman muka Koran Republika edisi Jumat, 10 Agustus 2018.

1.1 Figur Calon Wakil Presiden Menjadi Penentu

Kehadiran sosok Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno di kursi panas Calon Wakil Presiden pada kontestasi 2019 mendatang nampaknya menjadi warna tersendiri dalam pemberitaan SKH Republika. Bagaimana tidak, berita dengan judul “Kandidat Siap Mendaftar” tersebut menjadi *headline* yang hampir memenuhi halaman utama. Pemberitaan Republika ini dilengkapi dengan (*Visual Image*) foto kedua pasangan calon yakni Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi. Uniknya, dibawah foto tersebut dimuat total harta kekayaan dan rekam jejak masing-masing Calon Wakil Presiden.

Pemberitaan yang disajikan Republika terlihat memihak kepada Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal tersebut dikuatkan dengan dimuatnya (*Metaphors*) atau perumpamaan “Nasionalis Religius” untuk menggambarkan duet antara Jokowi yang berjiwa Nasionalis dan Ma'ruf Amin yang kental akan nuansa religi. Hal tersebut dianggap sebagai strategi Jokowi untuk mengantisipasi digulirkannya politik identitas dan isu agama sebagaimana yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta. Pada halaman sembilan juga memuat berita dengan judul “Kiai Ma'ruf Prioritaskan Ekonomi Umat”. Dalam pemberitaan tersebut Republika memuat (*Roots*) yang bersumber dari Ma'ruf Amin yang mengatakan “aspek pertama adalah menjaga keutuhan bangsa. Sebab, kalau bangsa tidak bersatu, pembangunan tidak mungkin dilakukan”. Yang artinya, bahwa Jika Jokowi-Amin terpilih maka persatuan dan keutuhan bangsa adalah prioritas utama yang harus direalisasikan.

Ketika Republika memuat berita yang bernada positif terhadap Jokowi-Amin dengan memuat perumpamaan duet mereka sebagai pasangan yang nasionalis dan religius. Beda halnya dengan pemberitaan yang dimuat Republika terhadap Pasangan cawapres Prabowo-Sandi dengan menulis berita miring terkait dugaan mahar politik cawapres Sandiaga Uno dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Republika memuat berita tersebut berulang kali yaitu pada Republika edisi Jumat, 10 Agustus dengan judul “PKS Berencana Laporkan Andi Arief” dan edisi Senin, 13 Agustus 2018 dengan judul “PAN Ikut Meradang”. Republika memuat kata bersifat konotatif (*Depiction*) “Jenderal Kardus” pada berita periode 10 Agustus yang berarti mudah dilipat atau dibentuk. Kata yang bernada miring tersebut ditujukan kepada Prabowo Subianto sebagai protes ketidakpuasan Andi Arief terhadap pencalonan Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo. Sedangkan pada edisi 13 Agustus Republika menggunakan kata (*Depiction*) “PAN Ikut Meradang”, kata tersebut digunakan Republika untuk menggambarkan reaksi dari pihak PAN yang merasa dirugikan oleh pernyataan Sekjen Partai Demokrat tersebut.

Republika edisi Rabu, 15 Agustus 2018 kembali memuat berita mengenai dugaan mahar politik Sandiaga Uno dengan judul “Relawan Jokowi Laporkan Sandiaga Uno”. Isi pemberitaannya tak jauh berbeda dengan dua berita yang senada pada pemberitaan Republika sebelumnya. Berita bernada miring tersebut menimbulkan (*Consequences*) bahwa adanya hubungan yang tidak harmonis di dalam koalisi Prabowo-Sandi, karena sebagaimana diketahui bahwa Andi Arief adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang masuk dalam koalisi oposisi Prabowo-Sandi.

Kemudian pada berita yang berjudul “Jokowi dan Prabowo Ingin Pemilu Damai” dengan menghadirkan (*Visual Image*)Foto Masing-masing pasangan calon bersama para petinggi partai koalisi. Republika memuat (*Exemplars*) suasana religi yang mewarnai suasana pendaftaran kedua pasangan calon, Republika menuliskan “Lantunan shalawat badar pun mengiringi kedatangan keduanya(Jokowi-Amin)”. Selain itu, Republika juga memuat exemplars mengenai kedatangan Prabowo-Sandi dengan menulis berita dengan narasi “Kedatangan mereka (Prabowo-Sandi) diiringi lantunan shalawat Nabi dengan Rebana”.

Aroma keberpihakan pemberitaan Republika kepada pasangan calon Jokowi-Amin semakin terasa dengan kemasan berita bernuansa religi yang sangat kental dengan kehidupan Ma’ruf Amin yang berlatar belakang santri NU, ditambah lagi dengan dimuatnya pernyataan dari kubu koalisi Jokowi-Amin yaitu Jusuf Kalla di dalam dua berita sekaligus yaitu berita berjudul “Jokowi dan Prabowo Ingin Pemilu Damai” dan berita berjudul “Kawal Pilpres Damai”. Pernyataan tersebut berbunyi “Saya yakin pemilu ini akan *soft*”. Kata *soft*tersebut menjadi (*Depiction*)bahwa pemilu presiden 2019 mendatang akan damai tanpa kekerasan. Jusuf Kalla melanjutkan, Bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh hadirnya figur Ulama dan pengusaha dari kedua Kubu.

Dari berita yang ditulis Republika terlihat jelas bahwa figur Calon Wakil Presiden pada pemilu 2019 mendatang mendapat sorotan yang lebih pada pemberitaan Republika dibandingkan pertarungan ulang antara Jokowi versus Prabowo. Hingga hari ketiga pasca pendeklarasian masing-masing Calon Wakil Presiden, pemberitaan mengenai figur Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno masih berlangsung. Pada pemberitaan Republika yang berjudul “Kejutan Last Minutes”

memuat (*Depiction*) dan (*Exemplars*). Republika memuat (*Depiction*) dengan menggunakan kata bermakna konotatif yaitu “*game changer*” yang berarti perubah alur permainan untuk menggambarkan keberadaan Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno dianggap sebagai figur yang merubah alur permainan. Sedangkan (*Exemplars*) yang dimuat Republika yaitu “Sebagaimana diketahui bahwa trah PDIP selalu sukses memenangkan pemilu jika didampingi tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Gusdur-Megawati; Megawati-Hamzah Haz; Jokowi-Jusuf Kalla”. Yang artinya, posisi Ma’ruf Amin sebagai figur yang berlatar belakang santri dan bertransformasi menjadi Ulama NU diharapkan mampu mengulang kemenangan layaknya duet PDIP dan NU pada pilpres yang sebelumnya.

Selain itu, Republika juga memberitakan beberapa ulasan dipilihnya Sandiaga Uno sebagai Calon Wakil Presiden yang mendampingi Prabowo Subianto, salah satunya Republika memuat (*Catchphrase*) “*Bargaining* koalisi sebagai *sweetener* (daya tarik politik) jika koalisi Gerindra-PKS-PAN tetap solid”. Kata *bargaining* dan *sweetener* di sini mengandung makna konotatif untuk menggambarkan kemungkinan terjadinya negosiasi politik antar partai pengusung dalam memilih figur yang akan menggantikan posisi Sandiaga Uno di kursi Jakarta II jika hubungan antara Gerindra-PAN-PKS tetap dalam jalur yang sama.

1.2 Dual Fungsi Ulama pada Pilpres 2019

Ideologi keislaman yang dianut Republika nampaknya memberi pengaruh yang signifikan terhadap ciri khas pemberitaan yang dimuatnya. Tak terkecuali berita-berita politik yang dikemas melalui pendekatan agama dan figur ulama yang telah berkontribusi besar dalam kontestasi politik praktis di Indonesia. Pada edisi Sabtu, 11 Agustus 2018, Republika memuat berita dengan judul “Musim Semi Ulama dan Politik Indonesia” dengan dilengkapi (*Visual Images*) sketsa

Kiyai bersurban dan bunga yang sedang mekar. Ilustrasi visual tersebut menegaskan situasi politik yang kental dengan peran ulama.

Republika menulis (*Depiction*) dan dua fakta menarik (*Exemplars*) perihal peran ulama pada pilpres 2019. Kata “Gerbong kekuatan baru” digunakan Republika untuk menunjukkan (*Depiction*) untuk menjelaskan kedigdayaan ulama yang mampu mendulang mayoritas suara masyarakat pada pemilu mendatang. Republika juga memuat fakta (*Exemplars*) perihal dual fungsi ulama yang merangkap sebagai umara, sebagaimana yang terjadi pada kedua kubu. Dari kubu Jokowi hadir nama Ma’ruf Amin seorang Ulama NU yang kini menjadi cawapres Jokowi di pilpres 2019 mendatang. Sedangkan dari kubu Prabowo, Republika memuat gerakan GNPF dan PA 212 yang merambah ke pilpres 2019. Misalnya, mereka mendukung tagar #2019GantiPresiden (*Catchphrase*) yang puncaknya adalah hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menyatakan dukungan kepada Prabowo sebagai Calon Presiden di pilpres 2019 mendatang.

Pada pemberitaan edisi Selasa, 14 Agustus 2018. Republika memuat berita dengan judul “Ulama Terjun Karena Para Politisi Gagal Menyejahterakan” dengan dilengkapi (*Visual Images*) sketsa lelaki dewasa bersurban dan seikat bunga di genggamannya. Judul berita tersebut sekaligus menjadi (*Appeals to Principle*) premis dasar dan kalim moral Republika dalam membingkai berita tentang dual fungsi ulama yang tidak hanya mengurus umat di bidang agama melainkan ikut memberikan pengaruh besar bahkan terjun langsung pada kontestasi politik praktis pada pilpres 2019 mendatang.

2. Framing Jawa Pos

Tidak tanggung-tanggung, pasca deklarasi Calon Wakil Presiden pada Kamis, 11 Agustus 2018 oleh masing-masing Calon. Surat Kabar Harian Jawa Pos edisi

Jum'at, 10 Agustus 2018 menuliskan 3 berita sekaligus dengan judul (1) "Pengumuman Cawapres Penuh Drama" dengan anak judul "Mengulang Pilpres 2014, Demokrat Jomblo Lagi", (2) "Kepentingan Parpol dan Kebutuhan Logistik", dan (3) "Mahfud MD Tidak Kecewa, Hanya Kaget".

1.1 Drama Politik Kepentingan Parpol vs Kebutuhan Logistik

Pada pemberitaan yang pertama yang berjudul "Pengumuman Cawapres Penuh Drama", Jawa Pos memuat (*Visual Images*)foto kedua paslon dengan teknik pengambilan gambar *medium close up* dilengkapi dengan biografi singkat masing-masing kandidat dan beberapa draft drama yang terjadi pada masing-masing kubu. Pada bagian anak judul Jawa Pos menulis "Mengulang Pilpres 2014, Demokrat Jomblo Lagi". Jawa Pos menggunakan kata yang bersifat konotatif yaitu "jomblo" yang ditulis pada anak judul berita yang pertama. Tak hanya sekali, Pada pemberitaan Jawa Pos edisi Sabtu, 11 Agustus 2018 yang berjudul "Jangan Gadaikan Persatuan" juga menggunakan kata "Jomblo". Kata tersebut dimuat untuk menggambarkan posisi Partai Demokrat yang belum menentukan sikap politik hingga berlangsungnya deklarasi capres-cawapres oleh kedua pasangan calon, meskipun pada detik-detik terakhir Partai Demokrat memberikan dukungan kepada Pasangan Prabowo-Sandi.

Di awal pemberitaan, Jawa Pos menulis (*Exemplars*)mengenai kegagalan Mahfud MD sebagai Cawapres Jokowi pada pilpres 2019 mendatang. Keputusan Jokowi memilih Ma'ruf Amin dianggap sebagai suatu keputusan yang mendadak, sebagaimana diketahui bersama bahwasanya nama Mahfud MD digadang-gadang sebagai figur yang akan menjadi cawapresnya. Namun, pertemuan singkat pak Jokowi bersama sembilan pimpinan partai koalisi yang berlangsung kurang lebih selama satu jam mulai pukul 16:00-17:00 WIB tersebut menutup kemungkinan

Mahfud MD menjadi cawapres Jokowi karena kesepakatan partai koalisi lebih memilih figur Ma'ruf Amin sebagai calon pendamping Jokowi.

Beberapa (*Exemplars*) bernada positif tentang Ma'ruf Amin dimuat oleh Jawa Pos. Sebagai contoh, mereka menyebut figur Ma'ruf Amin sebagai seorang tokoh agama yang bijaksana, ditambah lagi dengan dimuatnya *track record* Ma'ruf Amin di bidang pemerintahan dimuat secara detail, seperti pengalaman menjabat sebagai anggota DPR dan MPR, Dewan Pertimbangan Presiden, Rais am PBNU, Ketua MUI, hingga anggota Dewan Pengarah (BPIP). Selain itu terdapat perangkat perumpamaan (*Metaphors*) yang bersumber dari pak Jokowi dan (*Catchphrase*) bersumber dari Ma'ruf Amin yang dimuat oleh Jawa Pos. Mereka menuliskan pasangan ini (Jokowi dan Amin) sebagai kombinasi yang ideal yakni memiliki unsur "Nasionalis dan Religius" (*Metaphors*) yang saling melengkapi. Jawa Pos juga memuat suatu istilah (*Catchphrase*) yang diungkapkan oleh Ma'ruf Amin yang berbunyi "seorang ulama itu *idza ihtaja, fa'a*", kalimat tersebut memiliki arti bahwasanya seorang ulama yang baik itu "jika dibutuhkan haruslah bermanfaat". Istilah tersebut menunjukkan sikap optimis dan kesiapan Ma'ruf Amin ketika dipercaya sebagai pendamping Jokowi pada pilpres 2019.

Di samping memberitakan kubu Jokowi Amin, Jawa Pos juga memuat berita mengenai pengumuman capres-cawapres dari kubu oposisi. Namun sayangnya, berita yang dimuat berbanding terbalik dengan pemberitaan mengenai deklarasi capres-cawapres Jokowi-Amin. Berita yang ditulis Jawa Pos diawali oleh narasi bernada negatif yakni tentang kegalauan Partai Demokrat yang belum menentukan sikap hingga deklarasi capres-cawapres tersebut dilakukan. Jawa Pos memuat beberapa fakta (*Exemplars*) Kondisi partai koalisi yang hanya dihadiri oleh tiga pimpinan partai yakni PAN, PKS dan Gerindra. Ditambah lagi dengan

dimuatnya (*Exemplars*) penolakan pencawapresan Sandiaga Uno oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief. Dukungan dari Partai Demokrat macet karena belum bisa menerima alasan Prabowo tidak menunjuk Agus Harimurti sebagai cawapres. Tentu saja ini akan memberikan kesan bahwa dukungan yang akhirnya diberikan oleh Partai Demokrat kepada kubu Prabowo-Sandi seolah terpaksa dan setengah hati.

a. Kepentingan Partai Politik Koalisi Mendominasi

Pada berita yang berjudul “Kepentingan Parpol dan Kebutuhan Logistik” edisi Jum’at, 10 Agustus 2018. Jawa Pos memuat beberapa hasil analisa Lely Arriane seorang Pakar Komunikasi Politik, Lulusan Doktoral Terbaik Unpad, Bandung perihal keputusan politik masing-masing kubu dalam menentukan cawapresnya. Pada paragraf kedua, Jawa Pos memuat premis dasar atau klaim moral (*Appeals to Principle*) dan analisis kausalitas (*Roots*) yaitu dengan menulis kalimat “Kepentingan partai koalisi jauh lebih dominan dari yang kita pikirkan di luar sana”. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa kepentingan partai koalisi masih mendominasi dan masih bertengger di atas kepentingan yang lain. Karena adanya kekhawatiran jika Mahfud maju sebagai wakil presiden, maka masih ada potensi untuk maju ke pilpres 2024.

Hal tersebut tentu menimbulkan suasana di parpol akan penuh kecemasan sepanjang periode kepemimpinan bersama Jokowi. Jawa Pos juga menyebut Mahfud MD sebagai “Paket Komplet” (*Depiction*) untuk menggambarkan kualitas Mahfud yang sangat berkualitas untuk maju sebagai cawapres Jokowi. Namun lagi-lagi demi kepentingan parpol koalisi jangka panjang, figur yang komplet tersebut pun tergantikan oleh figur Ma’ruf Amin. Namun, bukan berarti pilihan yang dijatuhkan kepada Ma’ruf Amin

hadir tanpa alasan. Jawa Pos memulis (*Catchphrase*) bahwa "Politik identitas harus dijawab dengan identitas politik". Artinya, ada kemungkinan politik identitas akan digunakan untuk menyerang Jokowi, maka daripada itu dipilihlah Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi untuk mengantisipasi dimainkannya politik identitas tersebut.

b. Keniscayaan Logistik Dalam Pilpres 2019

Jika pencapresan Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi dianggap sebagai hasil dari dominasi kepentingan parpol pendukung pada kubu Jokowi. Lain halnya dengan berita pencapresan Sandiaga Uno sebagai pendamping Prabowo yang dianggap sebagai drama politik yang lebih hebat dibandingkan drama politik kubu Jokowi. Pada pemberitaannya, Jawa Pos menuliskan (*Catchphrase*) dengan menuliskan "politik itu *kan by design*, bukan *by accident*" yang berarti bahwa keputusan politik itu adalah sesuatu yang didesain atas kesepakatan dalam koalisi. Kalimat tersebut digunakan Jawa Pos untuk menggambarkan keadaan politik di kubu Prabowo yang koalisinya belum seratus persen menyatakan sikap untuk mendukung Prabowo Subianto. Sikap ketidak tegasan beberapa partai di koalisi pendukung Prabowo tersebut mengakibatkan *politic by accident* tersebut terjadi.

Jawa Pos juga memuat (*Depiction*) dengan menuliskan "Logistik itu keniscayaan". Kata keniscayaan tersebut dalam KBBI berarti sesuatu yang mutlak. Artinya, dalam menjalankan roda politik apalagi skala pilpres tentu faktor logistik merupakan sesuatu yang sangat vital. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompromi politik kubu Prabowo sangat membutuhkan seorang figur yang mampu berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan logistik koalisi.

Jawa Pos memuat frasa yang berbunyi “Di tengah partai yang *nggak* mau keluar biaya, Sandi punya”. Kalimat tersebut merupakan premis dasar (*Appeals to Principle*) yang digunakan untuk menggambarkan keputusan pencapresan Sandiaga Uno sebagai pendamping Prabowo. Untuk mempertegas alasan pemilihan Sandiaga Uno, di akhir berita Jawa Pos memuat (*Exemplars*) dengan menulis bahwa jika dilihat dari sisi elektabilitas, Anies Baswedan jauh di atas Sandi dan potensi menang lebih besar jika berpasangan dengan Anies. Namun karena alasan kebutuhan logistik, hal tersebut mampu merubah ritme politik sehingga keputusan cawapres Prabowo pun jatuh kepada Sandiaga Uno.

Dari penjabaran di atas sekilas terlihat keberpihakan Jawa Pos kepada kubu Jokowi-Amin. Kritik yang dimuat dalam pemberitaan mengenai pencawapresan Ma’ruf Amin tidak setajam kritik terhadap pencawapresan Sandiaga Uno. Ditambah lagi dengan berita berjudul “Mahfud MD Tidak Kecewa, Hanya Kaget”. Judul berita tersebut menjadi (*Exemplars*) yang memuat ketidakkecewaan Mahfud MD atas terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi. Jawa Pos juga menulis bahwa keputusan memilih Ma’ruf Amin adalah kewenangan mutlak Jokowi. Padahal pada pemberitaan sebelumnya menyebutkan bahwa kepentingan parpolah yang mendominasi bukan kewenangan atau prioritas Jokowi sebagai Capres. Namun, di satu sisi Jawa Pos memuat beberapa berita bernada negatif terhadap kubu Prabowo seperti pernyataan Andi Arief tentang penolakan dari Partai Demokrat terhadap pencawapresan Sandiaga Uno pada berita edisi Sabtu, 11 Agustus 2018 yang berjudul “Gagal Cawapres, AHY Minta Maaf”. Jawa Pos memuat beberapa *framing devices* seperti menuliskan (*Depiction*) “Jenderal Kardus” terhadap

Prabowo yang diduga memberikan mahar politik senilai 500 miliar kepada Partai PKS dan PAN.

1.2 *Hoax* dan Kampanye Pemilu 2019

Tidak hanya terfokus pada proses pencalonan kedua capres-cawapres pemilu 2019 mendatang, isu *hoax* nampaknya mendapat sorotan tersendiri oleh Jawa Pos selama sepekan pemberitaan pasca deklarasi cawapres oleh masing-masing kubu. Pada pemberitaan edisi Sabtu, 11 Agustus 2018 Jawa Pos menulis berita yang berjudul “Jargon Persatuan vs Kesejahteraan” yang dilengkapi dengan (*Visual Images*) penyerahan berkas syarat pencapresan kepada Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU. Pada foto tersebut terlihat kedua kubu berjabat tangan sambil menyerahkan berkas syarat pencapresan kepada Ketua KPU yang dihadiri juga oleh petinggi partai koalisi masing-masing kubu. Namun yang menjadi sorotan adalah kutipan dari pernyataan M. Qodari yang dimuat Jawa Pos dengan huruf cetak tebal yang berbunyi “Yang sering mengeluarkan *hoax* akan segan dengan Ma’ruf Amin. Tantangan terbesarnya merangkul suara NU. Nilai tambah Sandi mampu berbicara isu ekonomi. Namun saya tidak yakin dia bisa merebut suara dari Indonesia Timur”. Pernyataan M. Qodari yang dimuat oleh Jawa Pos tersebut menunjukkan keberpihakan terhadap Jokowi-Amin dengan memuat (*Metaphors*) dengan figur seorang Ma’ruf Amin yang mampu menetralkan *hoax* dengan ketokohnya. Namun juga pada kalimat setelahnya memuat nada negatif terhadap Sandiaga Uno yang dianggap tidak mampu merebut suara dari Indonesia Timur.

Jika pada berita sebelumnya Jawa Pos memuat pernyataan yang menganggap figur Ma’ruf Amin dengan kharisma dan ketokohnya mampu meminimalisir *hoax*. Namun berbeda halnya dengan berita yang berjudul “*Voters*

Muda, Jangan Baperan” menjelaskan bahwa di era internet dan *asymmetric information* ini sulit sekali membedakan informasi yang asli atau *hoax*, hal tersebut tentu akan berdampak terhadap kampanye politik akan dilakukan melalui berbagai serangan di media sosial.

Jawa Pos dalam berita berjudul “Jangan Gadaikan Persatuan” memuat berita mengenai antisipasi *hoax* yang akan terjadi menjelang pemilu presiden 2019. Jawa Pos menuliskan “bahwa kedua kubu harus berperan aktif dalam mendinginkan situasi jika terjadi eskalasi politik”. Terdapat kata (*Catchphrase*) “eskalasi politik” digunakan Jawa Pos untuk menggambarkan keadaan politik yang sedang memanas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eskalasi berarti keanaikan atau pertambahan. Dalam konteks ini eskalasi politik tersebut digambarkan sebagai peningkatan kepentingan politik berbagai pihak sehingga menimbulkan beragam informasi termasuk *hoax* di media sosial.

Pada pemberitaan edisi Minggu, 12 Agustus menurunkan dua berita yang berjudul “Aturan Kampanye di Media Sosial” dan “Hoax Marak, Gagal Bangun Komunikasi Politik Sehat”. Pada pemberitaan yang pertama, Jawa Pos memuat infografis (*Visual Images*) seorang figur lengkap dengan dasi dan jas sedang berorasi di podium yang lantainya diberi ilustrasi handphone dilengkapi oleh logo beberapa sosial media seperti WhatsApp, Twitter, Facebook dan Instagram. Ilustrasi tersebut menggambarkan korelasi antara kegiatan politik dan sosial media yang sangat berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi-informasi politik untuk meraup suara dari masyarakat. Pada kedua berita yang dimuat Jawa Pos edisi Minggu, 12 Agustus ini tidak sama sekali menyinggung kubu Jokowi-Amin ataupun Prabowo-Sandi. Namun, lebih menyorot kepada

seluruh partai politik yang ada di Indonesia ini memiliki tanggung jawab untuk membangun komunikasi politik yang sehat di kalangan masyarakat.

Pada pemberitaan edisi Senin, 13 Agustus 2018, Jawa Pos menulis berita yang berjudul “Bentuk Tim Lawan Hoax Medsos” dengan anak judul “Strategi Kampanye Jokowi Ma’ruf”. Berita tersebut menyertakan (*Visual Images*) foto Jokowi dan Ma’ruf Amin yang menunjukkan luka bekas jarum pada lengan tangan mereka setelah pengambilan sampel darah dalam tes kesehatan di RSUD Gatot Soebroto. Berita yang ditulis Jawa Pos ini tidak menyebutkan secara spesifik strategi kubu Jokowi-Amin dalam memerangi *hoax* namun lebih kepada kesiapan dan kematangan tim kampanye yang sudah mereka bentuk. Pada awal pemberitaan dituliskan (*Exemplars*) mengenai struktur organisasi tim kampanye nasional Jokowi Ma’ruf. Mulai dari sekretaris, bendahara, *command and control room* dan juru bicara yang totalnya berjumlah 250 orang. Di akhir pemberitaan, Jawa Pos juga memuat (*Exemplars*) berita yang bersumber dari Sandiaga Uno bahwasanya pembentukan tim kampanye Prabowo-Sandi masih dalam proses penyusunan yang melibatkan empat partai pengusung. Jawa Pos juga memuat isu mengenai mayoritas suara yang menginginkan SBY sebagai ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi.

Jwa Pos pada pemberitaan edisi Selasa, 14 Agustus 2018 menulis berita berjudul “Janji Transparan Dana Kampanye” dengan anak judul “Pastikan SBY Bukan Ketua Tim Sukses”. Isu kemungkinan SBY menjadi ketua tim pemenangan pada pemberitaan Jawa Pos di hari sebelumnya terbantahkan oleh anak judul berita pada hari setelahnya. Pemberitaan yang ditulis Jawa Pos tersebut dilengkapi dengan (*Visual Images*) foto pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Gatot

Soebroto. Di awal pemberitaannya, Jawa Pos memuat pembelaan tim Prabowo-Sandi mengenai isu mahar politik yang dihembuskan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief. Jawa Pos memuat (*Exemplars*) Pembelaan yang bersumber dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang mengatakan bahwa ia berjanji kubu Prabowo-Sandi akan transparan soal dana kampanye dan seluruh partai pendukung harus ikut berkontribusi, imbuh Fadli.

Selain itu, Jawa Pos juga memuat tuntutan Zon terhadap paslon Jokowi-Amin agar transparan terkait dana kampanye dengan memuat pernyataan Fadli Zon yang bersifat konotatif (*Depiction*) yang berbunyi “Kami tidak ingin ada dana siluman, semua lebih baik terbuka”. Terdapat kalimat “dana siluman” pada pernyataan tersebut yang menggambarkan kemungkinan adanya sumber pendanaan kampanye yang tidak jelas asal usulnya, oleh karena itu dihimbau agar terbuka dan transparan. Selanjutnya pemberitaan Jawa Pos ini memuat beberapa (*Exemplars*) mengenai pembentukan tim pemenangan yang belum terselesaikan dan masih berada di tahap pembentukan kerangka tim. Tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat kontras mengingat pada sehari sebelumnya Jawa Pos dengan detil menuliskan berita mengenai pembentukan tim kampanye kubu Jokowi-Amin yang sudah selesai dari tingkat nasional hingga daerah sedangkan dari kubu Prabowo-Sandi masih dalam tahap penyusunan kerangka tim pemenangan.

2. Framing Kompas

Hingga detik-detik akhir waktu pendaftaran capres-cawapres yang telah ditentukan oleh KPU, kedua kubu masih belum menentukan pilihan terkait bakal cawapres yang akan mendampingi masing-masing capres pada pesta demokrasi 5 tahunan sekali tersebut. Hingga pada akhirnya tepat pada H-1 hari masa pendaftaran berakhir yaitu hari Kamis, 9 Agustus 2018 kedua kandidat mendeklarasikan figur

cawapres pada pilpres 2019 mendatang. Calon Presiden petahana mengusung figur K.H Ma'ruf Amin sebagai cawapres, sedangkan Calon Presiden dari kubu penantang Prabowo Subianto menggandeng figur ekonom Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Situasi perpolitikan Nasional seperti ini lantas menjadi perhatian serius seluruh media cetak di Indonesia, tak terkecuali Surat Kabar Harian Kompas yang menjadikan peristiwa deklarasi tersebut sebagai *headline* pada pemberitaannya.

3.1 Keputusan Politik Pragmatis di Detik-detik Terakhir

Pada pemberitaan edisi Jumat, 10 Agustus 2018 Kompas memuat berita deklarasi capres-cawapres menjadi *headline* yang pemberitaannya hampir memenuhi satu halaman muka. Kompas menerjunkan berita dengan judul “Dinamika Terakhir Menjadi Penentu” dengan dilengkapi (*Visual Images*) deklarasi Jokowi dan Prabowo yang dihadiri oleh beberapa petinggi partai koalisi masing-masing. Untuk memperjelas koalisi pada masing-masing kubu, Kompas juga memuat visual infografis partai pendukung capres-cawapres Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi. Di awal pemberitaannya, Kompas memuat (*Metaphors*) dengan menulis bahwa keputusan kedua kubu dalam menentukan cawapresnya menunjukkan praktik politik di Indonesia yang cenderung pragmatis. Kata “pragmatis” digunakan Kompas untuk menggambarkan keputusan yang bersifat praktis pada kedua kubu dalam menentukan figur cawapresnya yang dideklarasikan di detik-detik akhir pendaftaran. Sebagaimana diketahui bersama nama Mahfud MD sangat santer disebutkan sebagai kandidat terkuat cawapres Jokowi. Namun, hasil musyawarah koalisi menjelang deklarasi bisa merubah segalanya hingga akhirnya nama Ma'ruf Amin keluar sebagai figur yang akan mendampingi Jokowi di pilpres 2019 mendatang. Sedangkan dari kubu Prabowo, kesan pragmatis itu disampaikan Kompas dengan memuat pemberitaan

perihal Nama Sandiaga Uno yang mulai santer terdengar sebagai figur yang akan menjadi cawapres Prabowo di tiga hari terakhir dan semakin menguat di hari terakhir.

Kompas membagi pemberitaannya menjadi dua bagian, dengan menulis anak judul “Menerima” dan “Mundur” yang ditulis dengan font *Bold* (tebal). Kata “Menerima” tersebut ditulis Kompas untuk menjelaskan ketidak kecewaan Mahfud MD yang gagal bersanding bersama Jokowi pada pesta demokrasi 2019 mendatang dan menerima dengan lapang dada keputusan Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Sedangkan kata “Mundur” ditulis Kompas untuk menggambarkan sikap Sandiaga Uno yang harus melepaskan Jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra agar bisa maju sebagai cawapres Prabowo melalui jalur Independen.

Selain itu Kompas memuat (*Exemplars*)perihal Partai demokrat yang belum menentukan arah koalisi dengan menulis “Partai Demokrat menjadi satu-satunya parpol pemilik kursi di DPR yang hingga semalam (Kamis 9 Agustus 2018) pukul 23:45 belum menyatakan dukungannya di pilpres”. Pada pemberitaan ini Kompas tampak bermain aman dengan tidak menjelaskan lebih dalam alasan Partai Demokrat belum menentukan sikap politiknya hingga detik-detik akhir masa pendaftaran sebagaimana pemberitaan yang dimuat oleh Republika dan Jawa Pos yang cukup detail menjelaskan pokok permasalahannya.

Kompas juga memuat (*Metaphors*) yang bersumber dari Sekjen PKB Abdul Karding yang mengatakan “Kombinasi kepemimpinan Nasionalis dan Religius” sebagai deskripsi duet Jokowi yang nasionalis dan Ma’ruf Amin yang memiliki background santri dan ulama. Kompas menganggap Ma’ruf Amin sebagai figur yang akan melengkapi Jokowi dengan menulis (*Depiction*) “Ma’ruf

Amin mampu menambal apa yang dipersepsikan publik selama ini jauh dari pak Jokowi”. Kata “menambal” tersebut bersifat konotatif yang mana digunakan Kompas untuk menggambarkan figur Ma’ruf Amin yang akan meruntuhkan stigma publik tentang Jokowi yang anti Islam, Jokowi PKI dan lain-lain. Selain itu, pada halaman dua pada rubrik Politik & Hukum, Kompas menyertakan infografis mengenai riwayat hidup kedua pasangan calon yang diberi judul “Kontestasi Menuju Pilpres 2019 Dimulai” dengan dilengkapi (Visual Images) foto kedua pasangan calon di posisi kiri Jokowi-Amin sedangkan Prabowo-Sandi di posisi kanan dengan ditengahi simbol Negara Republik Indonesia yaitu simbol garuda.

Berita-berita yang diturunkan Kompas sebagai *headline* tentang isu politik Nasional seperti pilpres 2019 edisi Jum’at 10 Agustus 2018 seketika terkesan netral, karena menyuguhkan berita yang notabene cenderung menghindari konfrontasi yang ada, sehingga berdampak pada suguhan berita yang pembahasannya tidak sampai kepada akar masalah melainkan hanya sebatas kulitnya saja. Meskipun demikian, hal yang menarik dari pemberitaan Kompas kali ini datang dari rubrik opini yang mana dari judul hingga berita yang dimuatnya lebih tajam dan lebih berani dibandingkan dengan headline pada halaman muka Kompas.

Dalam tajuk rencana yang berjudul “Pemilu Presiden Elitis” Kompas menulis beberapa perangkat framing seperti *Depiction*, *metaphors* dan *Catchphrase* untuk menjelaskan keputusan politik pragmatis tersebut. Di awal berita, Kompas menulis (*Depiction*) “*power sharing*” yang bermakna konotatif yaitu pembagian kursi kabinet. Kata tersebut digunakan Kompas untuk menunjukkan dampak dari keputusan politik pragmatis dengan menulis

mementingkan hitungan matematika politik. Kata “matematika politik” tersebut menunjukkan keputusan politik yang berfokus kepada kepentingan elite politik yang cenderung menganak tirikan kepentingan utama yaitu masyarakat. Di akhir berita, Kompas menutup pemberitaannya dengan memuat (*Catchphrase*) sekaligus menjadi (*Consequences*) yang mengutip intelektual Amerika, James Clarke yang mengatakan “seorang politisi berpikir tentang pemilihan ketika seorang negarawan berfikir tentang generasi masa depan”. Frasa yang menarik dan tajam tersebut menunjukkan realitas politik masa kini di Indonesia yang masih didominasi oleh politisi namun miskin negarawan.

Pada pemberitaan edisi Sabtu, 11 Agustus 2018, Kompas memuat berita yang dijadikan sebagai *headline* dengan judul “Semua Kandidat Dorong Pemilu Damai” dengan memuat (*Visual Images*) Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang melambaikan tangan kepada para pendukungnya setelah mendaftarkan diri di Kantor Komisi Pemilihan Umum. Kompas nampaknya ingin memperlihatkan kenetralan dalam memberitakan informasi seputar pemilu, terlihat dari foto-foto yang dijadikan headline beritanya mengandung komparasi yang sepadan antara kubu Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi. Pada pemberitaan edisi Sabtu, 11 Agustus 2018, Kompas memuat beberapa (*Exemplar*) yang tidak menonjolkan salah satu kubu saja. Contoh, pada paragraf pertama di awal pemberitaan Kompas menulis *Exemplars*”Joko Widododan Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyampaikan pesan yang sama yaitu agar kontestasi elektoral berlangsung damai”. Pada sub judul “Demokrasi” Kompas juga memuat *Exemplars* dengan menuliskan “Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin jadi pendaftar pertama yang mendatangi KPU. Mereka hadir sebelum shalat jum’at dengan didampingi pimpinan tujung partai politik (parpol) pengusung”. Pada

paragraf selanjutnya Kompas memuat *Exemplars* mengenai Prabowo-Sandi dengan menulis “Sekitar tiga jam kemudian, setelah shalat jum’at, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga mendaftar disertai empat pimpinan parpol pengusung”.

Pada sub judul “Tantangan Ekonomi” Kompas juga menghadirkan komparasi dari cawapres Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno dengan menuliskan *Eksemplars* sebagai berikut “Sandiaga menyampaikan, dirinya dan Prabowo akan berjuang menghadirkan pertumbuhan dan pembaruan dalam sistem ekonomi yang membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Sementara itu pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin berjanji akan memperkuat ekonomi umat apabila terpilih pada pilpres 2019”. Jika diperhatikan dari awal pemberitaannya, Kompas nampak bermain aman dengan memuat komparasi antara Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi dengan seimbang namun tidak memberitakan informasi yang tajam secara mendalam.

Pada halaman kedua, Kompas menurunkan berita yang lebih berani dan lebih mendalam dibandingkan berita sehari sebelumnya. Kompas menuliskan berita di rubrik Politik & Hukum dengan judul “Politik Tikungan Terakhir” dengan memuat beberapa *metaphors*, *depiction* dan *appeals to principles*. Pada bagian judul, Kompas memuat frasa yang menarik (*depiction*) dengan menulis “Politik Tikungan Terakhir” untuk menggambarkan dinamika pemilihan cawapres pada kedua kubu yang berlangsung hingga detik-detik akhir waktu pendaftaran. Pada awal pemberitaannya, Kompas memuat perumpamaan (*Metaphors*) dengan menulis bahwa “Politik itu mirip MotoGP. Tikungan terakhir menentukan hasil akhir. Valentino Rossi dan Marc Marquez sering membuat kejutan di tikungan terakhir”. Kompas menulis perangkat *metaphors* bahwa

politik itu sangat mirip dengan balapan MotoGP yang kerap kali menjadikan tikungan akhir sebagai penentu. Kompas mengumpamakan posisi Ma'ruf Amin dan Mahfud MD seperti persaingan antara Valentino Rossi yang bermanuver memotong jalur Marc Marquez dan Rossi keluar sebagai juara pada perhelatan MotoGP di Sirkuit Assen 2015. *Metaphor* tersebut digunakan Kompas untuk menjelaskan sinyal atau narasi politik yang sudah lam dibangun oleh kubu Jokowi yang akan memininang figur Mahfud MD sebagai cawapres, namun kemungkinan menjadi cawapres tersebut harus kandas di detik-detik terakhir setelah di *overtake* oleh figur Ma'ruf Amin berdasarkan pertimbangan dari beberapa parpol pendukung koalisi Jokowi. Kompas juga memuat berita bahwa sempat ada penolakan dari beberapa partai politik pendukung Jokowi terhadap figur Mahfud MD. Mereka juga mengancam akan hengkang dari koalisi apabila tetap memilih Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi. Hal tersebut menjadi premis dasar (*Appeals to Principle*) mengapa keputusan yang terkesan praktis pada detik-detik akhir tersebut membuat nama Ma'ruf Amin yang keluar dari saku Jokowi.

Sedangkan politik tikungan terakhir di kubu Prabowo dimuat Kompas dengan menulis (*Exemplars*) bahwa Prabowo mendapat tekanan dari beberapa parpol anggota koalisi yang ngotot agar kader mereka dijadikan cawapres Prabowo. Agus Harimurti Yudhoyono adalah salah satu nama yang disodorkan Demokrat sebagai cawapres. Begitu juga dari hasil ijtima' ulama yang mengerucutkan nama Salim Segaf al-jufri dan Ust. Abdul Somad yang diusung sebagai cawapres Prabowo. Dalam situasi sulit ini, figur Sandiaga Uno muncul dan menyalip ketiga nama yang sebelumnya sangat santer terdengar menjadi cawapres Prabowo. Kompas menilai opsi pemilihan Sandiaga Uno tersebut

adalah opsi yang paling aman dan yang paling bisa diterima oleh seluruh parpol pengusung, kecuali Demokrat.

Kompas juga memuat berita perihal kekecewaan Partai Demokrat dengan menuliskan (*Depiction*)“Partai Demokrat meradang karena terkena PHP”. Kompas menggunakan kata “meradang” dan “PHP” untuk menjelaskan keadaan Partai Demokrat yang kecewa atas keputusan Prabowo yang memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres. Tidak hanya itu, Kompas juga memuat cuitan Andi Arief yang mengatakan(*Metaphors*) “Prabowo Jenderal Kardus”. Perangkat perumpamaan tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa Prabowo mudah terpengaruh dan tidak teguh pendirian sama halnya dengan kardus yang mudah ditekuk dan dilipat.

Di akhir pemberitaannya, Kompas memuat (*Catchphrase*) bahwa “Politik itu drama dan akrobatik. Seperti es batu, politik itu tidak bisa beku selamanya”. Frasa tersebut digunakan Kompas untuk menggambarkan situasi politik pada kedua kubu yang penuh dengan dinamika dan juga menjelaskan bahwa keputusan politik di detik-detik akhir mampu merubah semua ritme yang telah terbentuk sebelumnya.

3.2 Efek Ekor Jas (Coat Tail Effect) Pemilu 2019

Pasca pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum pada Jumat, 10 Agustus 2018. Pemberitaan Kompas edisi Sabtu, 11 Agustus 2018 menerbitkan berita dengan judul “Strategi Para Pemburu Efek Ekor Jas” dengan menampilkan (*Visual Images*) foto kedua pasangan capres-cawapres yang sedang mendaftarkan diri sebagai di kantor KPU dengan didampingi para petinggi partai politik pendukung masing-masing. Pada pemberitaannya, Kompas membuat judul yang cukup menarik dengan menggunakan koasa kata yang bersifat konotatif

(*Depiction*) yaitu “Strategi Para Pemburu Efek Ekor Jas”. Kata “para pemburu” tersebut digunakan Kompas untuk menggambarkan partai politik pendukung capres-cawapres Jokowi-Amin maupun Prabowo-Sandi yang mencari keuntungan dari figur kedua pasangan capres-cawapres tersebut. Sedangkan “Efek Ekor Jas” adalah leksikon yang digunakan Kompas untuk menggambarkan sesuatu yang menjadi incaran para pemburu tersebut yaitu memperoleh hubungan yang positif antara kekuatan elektoral capres atau cawapres terhadap parpol pendukung. Apalagi pada pemilu 2019 mendatang adalah pertama kalinya pemilu presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan pada hari yang sama. Hal tersebut membuat parpol pengusung berharap agar figur capres-cawapres yang mereka dukung mampu mengamankan perolehan elektoral partai pada pemilu legislatif.

Menurut Kompas, efek ekor jas Partai PPP dan PKB dapat diperoleh dari kehadiran sosok Ma'ruf Amin yang dulu pernah menjabat sebagai DPR dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari PPP dan memiliki kedekatan dengan PKB. Jadi, meskipun kader mereka tidak dipilih menjadi cawapres pendamping Jokowi, namun kehadiran Ma'ruf Amin diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap partai. Selain itu Kompas juga memuat pernyataan Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus yang mengatakan “Kami sedang bermain di medan baru”. Pernyataan Sekjen Golkar tersebut mengandung perangkat (*Metaphors*) yang mendeskripsikan pemilu serentak ini sebagai “medan baru” sehingga harus memikirkan agar efek ekor jas pemilu tersebut sampai kepada Partai Golkar. Oleh karena itu citra Golkar selalu didekatkan dengan sosok Jokowi dan Ma'ruf Amin melalui berbagai alat peraga kampanye.

Sedangkan dari Kubu oposisi Prabowo-Sandi, Kompas menilai bahwa efek ekor jas tersebut berpotensi menguntungkan Gerindra. Kompas memuat

analisis kausalitas (*Roots*) dengan menulis “Jika mengacu pada teori efek ekor jas, kondisi ini berpotensi banyak menguntungkan Gerindra. Ini karena Prabowo dan Sandiaga sama-sama berasal dari Gerindra meski saat ini Sandiaga telah mundur dari partai”. Namun isu efek ekor jas yang menguntungkan Gerindra tersebut terpatahkan dengan sikap Sandiaga Uno untuk mundur dari Gerindra yang mana adalah salah satu bagian dari kesepakatan PAN. Artinya efek ekor jas pemilu masih bisa mengalir ke parpol pengusung lain seperti PKS, PAN dan Demokrat.

Pada pemberitaan edisi Minggu, 13 Agustus 2018. Kompas menulis berita dengan judul “Menakar Dampak Efek Ekor Jas” dengan memuat (Visual Images) foto konferensi pers pasangan capres-cawapres Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi yang dihadiri seluruh petinggi parpol pendukung. Kompas menulis pemberitaan mengenai efek ekor jas pada pemilu 2019 dengan memuat pernyataan Koordinator Program Tata Kelola Pemilu Universitas Sam Ratulangi, Manado, Ferry Daud. Ferry mengatakan bahwa efek ekor jas tidak akan terlalu berpengaruh terhadap perolehan elektoral pada pemilu legislatif karena pemilih cenderung memilih figur caleg bukan partai politik. Alasan lain bahwa efek ekor jas tersebut tidak terlalu berpengaruh adalah kandidat capres-cawapres itu diusung oleh koalisi. Jika setiap parpol mengusung capres-cawapres baru efek ekor jas akan berpengaruh.

Di akhir pemberitaan Kompas memuat (*Appeals to Principle*) bahwa efek ekor jas akan terasa pada pemilu 2019, namun belum bisa memperkirakan dampaknya. Mengingat pemilu serentak antara pilpres dan pileg adalah untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. Kompas juga memuat perkiraan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga yang memperkirakan di kubu Prabowo-

Sandi Partai Gerindra akan menikmati dampak paling besar efek ekor jas dari Prabowo. Sedangkan di kubu Jokowi-Amin PDIP di anggap partai yang menikmati dampak paling besar efek ekor jas dari Jokowi. Beberapa berita yang dimuatnya, Kompas terlihat tidak memihak kepada salah satu pasangan Jokowi-Amin maupun Prabowo-Sandi karena pemberitaannya yang cenderung membahas isu yang bersifat general dan penggunaan bahasa yang halus dan lugas.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembingkai Berita

Menurut J. Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam (Krisdinanto, 2014 : 8) ada beberapa faktor dalam mengidentifikasi kepentingan yang mempengaruhi pembingkai sebuah berita pada media yaitu individu pekerja media (*individual level*), rutinitas media (*media routines level*), organisasi media (*organizational level*), luar institusi media (*extramedia level*), dan ideologi media (*ideology level*). Teori ini menjelaskan bahwa isi media yang tersajikan kepada khalayak tidak datang dari ruang hampa yang netral, bebas kepentingan, dan disalurkan oleh medium yang bebas distorsi, namun merupakan hasil dari pengaruh kebijakan internal media seperti kepentingan pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita serta rutinitas yang sudah terbentuk dalam organisasi media tersebut. Sedangkan dari faktor eksternal media berhubungan dengan pengiklan, Narasumber, elit politik dan pemerintah yang berkuasa.

Pesta demokrasi pilpres dan pileg 2019 yang akan dilakukan secara serentak pada 17 April 2019 tentu menjadi bahan pemberitaan yang sangat menarik perhatian semua media massa dari skala nasional hingga media massa skala daerah dan kota. Tentu keberagaman media yang ada di Indonesia juga akan menyebabkan pemberitaan yang beragam tentang suatu realitas yang ada. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pembuatan berita Harian Republika, Harian Jawa Pos

dan Harian Kompas yaitu (*extramedia level*) luar institusi media dan (*ideology level*) ideologi media.

1. Level Extramedia

a. Pemerintah

Eksistensi dan perkembangan pers pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh sistem pers yang diatur sedemikian rupa oleh sistem politik pemerintahan yang berlaku (Hutagalung, 2013 : 54). Ada empat kategori konsep sistem pers, yaitu Pers Otoriter (*The Authoritarianism Press*), Pers Komunis (*The Communism Press*), Pers Liberal (*The libertarianism Press*), dan Pers Tanggung Jawab Sosial (*The Social Responsibility Press*) (Purba, 2006 : 40). Mengenai masalah sistem pemerintahan, Surat Kabar Kompas, Jawa Pos dan Republika adalah beberapa contoh surat kabar yang tidak terlepas dari belenggu SIUPP pada masa Orde Baru.

Pada saat itu berlaku dua perundang-undangan yang menjadikan sistem pers di Indonesia masuk dalam sistem otoriter, yang mana pemerintah melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat terhadap pers untuk menjaga agar aktivitas mereka tidak menyimpang dari kepentingan-kepentingan negara. Oleh karena itu diberlakukanlah Undang-undang No. 11 Tahun 1966 yang disempurnakan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1982. Undang-undang tersebut mengharuskan media agar tunduk pada 13 aturan agar bisa bermedia dengan resmi di Indonesia. Antara lain media harus berafiliasi dengan partai politik, harus memiliki badan usaha dan tidak boleh memberitakan informasi yang bersifat bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Hal tersebut mengharuskan Kompas berafiliasi dengan Partai Katolik dan Republika harus mendirikan PT. Abdi Bangsa. Sedangkan Jawa Pos pada tahun 1970-an sedang mengalami kemerosotan yang sangat tajam,

sehingga pada tahun 1982 The Chung Shen memutuskan untuk menjualnya kepada Eric F.H. Samola seorang Direktur Utama PT Grafiti Pers (Wicaksono dkk, 2015 : 18).

Tekanan yang dilakukan pemerintahan orde baru kepada pers sangat berdampak terhadap strategi serta isi dan gaya pemberitaan yang disuguhkan oleh pers kala itu. Sebagai contoh Kompas memilih bermain aman dengan tidak terlalu frontal mengkritisi pemerintah yang berkuasa pada saat itu, sehingga atas kehati-hatiannya tersebut Kompas mendapat julukan “jurnalisme keping” oleh tokoh pers Rosihan Anwar (Hutagalung, 2016 : 4). Jawa Pos sebagai surat kabar yang ingin bangkit dari keterpurukan mau tidak mau harus mengatur porsi informasi bermuatan politik pemerintahan di dalam pemberitaannya dan mengalokasikan berita seputar olahraga terutama berita sepakbola pada halaman surat kabarnya. Hal tersebut dilakukan Jawa Pos untuk mensiasati kebijakan politik Soeharto yang represif serta untuk meningkatkan oplah Jawa Pos (Junaedi, dkk, 2017 : 124). Sedangkan Republika sebagai surat kabar pendatang baru harus mendirikan PT. Abdi Bangsa yang dibidani oleh ICMI agar bisa mendapatkan SIUPP dari rezim penguasa. Namun, perjalanan awal Republika tidak seberat Kompas dan Jawa pos, hal tersebut dikarenakan Republika memiliki koneksi yang baik kepada pemerintah. Sebagaimana diketahui bersama Yayasan Abdi Bangsa diketuai oleh Menteri Riset dan Teknologi kala itu B.J. Habibie (Hill, 2011 : 155).

Tindakan represif yang diterapkan oleh rezim Orde Baru memaksa Kompas, Jawa Pos dan Republika ketika itu untuk beradaptasi dengan kepentingan pemerintah. Sehingga berdampak pada pemberitaan yang hampir sama antara satu media dengan media lainnya dalam mengemas berita terkait politik, kebijakan pemerintah, hingga pemberitaan mengenai ekonomi yang telah

dicapai oleh pemerintah dan jajarannya. Akibatnya, pemberitaan yang keluar dari media cenderung tidak banyak perbedaan dan terkesan tidak berani mengkritisi kinerja pemerintah, alhasil pemberitaan yang termuat di media hanya seputar kesuksesan pemerintah dan kebenaran kebijakannya. Sebab jikalau berani memuat berita negatif atau kritik atas kinerja pemerintah maka ancaman pencabutan SIUPP bisa saja menerjang instansi media yang risikonya harus siap gulung tikar.

Angin segar pers Indonesia mulai terasa dengan munculnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers nasional. Perundang-undangan tersebut sekaligus menjadi titik balik perkembangan pers di Indonesia yang mengubah sistemnya ke sistem tanggung jawab sosial sebelum akhirnya merangkak menuju sistem libertarian. Hal tersebut dipicu oleh konten yang kelewat bebas dan tidak memenuhi unsur tanggung jawab sosial sekalipun, selain mencari keuntungan yang besar (Poti, 2011 : 19). Di era demokrasi saat ini, pemerintah sudah tidak lagi mengekang pers dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat membelenggu kebebasan pers tersebut, seperti SIT yang dulu pernah berlaku pada masa pemerintahan orde lama dan SIUPP pada masa orde baru. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pasca digulirkannya orde baru ke reformasi tidak ada lagi intervensi untuk selalu memihak kepada pemerintah. Artinya, media dewasa ini bisa bebas memilih topik pemberitaan yang lebih beragam serta kewenangan media untuk memihak ada sepenuhnya ditangan media itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

Sehingga terkait afiliasi dengan pemerintah dalam Kompas, Jawa Pos dan Republika mengenai pemberitaan pilpres 2019 bisa diartikan sebagai keputusan dari masing-masing media. Karena, saat ini, framing perihal pemberitaan pilpres

adalah sepenuhnya kendali mereka, tidak dalam genggamannya pemerintah layaknya dulu di masa orde baru. Adapun framing yang terbangun melalui analisa di atas, keberpihakan dalam pemberitaan sudah bisa terlihat. Republika dalam hal ini terlihat memihak kepada capres petahana yaitu pasangan Jokowi-Amin. Terlihat dari pemilihan narasumber, penonjolan beberapa aspek serta perangkat framing yang digunakan dalam pemberitaannya. Republika nampak lebih menitik fokuskan pemberitaannya kepada masing-masing cawapres daripada figur capres itu sendiri. Berita yang dibangun juga berpotensi menguntungkan pasangan calon Jokowi-Amin, mulai dari headline hingga isi berita. Sebagai contoh, Republika membangun berita positif mengenai Ma'ruf Amin dalam berita yang berjudul "Kiyai Ma'ruf Prioritaskan Ekonomi Umat". Di sisi lain, Republika juga memberitakan berita negatif mengenai pencalonan Sandiaga Uno sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Republika memuat berita tentang dugaan kasus mahar politik yang melibatkan Sandi dengan Partai PAN dan PKS pada berita yang berjudul "Relawan Jokowi Laporkan Sandiaga Uno". Selain itu, Republika juga menampilkan berita negatif mengenai koalisi Prabowo-Sandi yaitu koalisi Indonesia adil makmur dengan memuat beberapa masalah yang terjadi di internal koalisi. Seperti cuitan Andi Arief yang mengatakan Prabowo Jenderal Kardus serta tindakan PKS yang berencana melaporkan Andi Arief. Konsekuensi yang didapat dari framing tersebut yaitu adanya hubungan yang tidak harmonis di dalam koalisi Prabowo-Sandi.

Sedangkan Jawa Pos bisa dibilang lebih berani dan lebih tajam dibandingkan dengan Republika dalam mengulas pemberitaan terkait pilpres 2019. Sekilas terlihat bahwa Jawa Pos tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Hal tersebut terlihat dari pemilihan kata pada headline dan judul berita

yang lainnya, namun ketika dibaca secara mendalam terdapat beberapa narasi negatif yang terdiri dari beberapa perangkat framing dan perangkat penalarang yang berbau negatif kepada salah satu pasangan calon. Sebagai contoh, Jawa Pos menilai bahwa drama yang terjadi di kubu Prabowo-Sandi lebih hebat jika dibandingkan dengan kubu Jokowi-Amin. Jawa Pos juga memuat beberapa frasa yang menonjol dan bernada negatif salah satunya dengan menyebut “politik itu *by design*, bukan *by accident*”, frasa tersebut dimuat Jawa Pos untuk menggambarkan keadaan partai politik pendukung dikubu Prabowo-Sandi yang belum seratus persen menyatakan sikap.

Sedangkan berita bernada positif tentang duet Jokowi-Amin kerap dimuat oleh Jawa Pos. “Nasionalis Religius” adalah salah satu narasi yang dimuat oleh Jawa Pos untuk menggambarkan duet pasangan calon Jokowi-Amin, selain itu dimuat juga oleh Jawa Pos mengenai langkah tepat koalisi Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Ia juga memuat jargon yang bernada positif bahwasanya “politik identitas harus dijawab dengan identitas politik”. Sehingga bisa dikatakan bahwa Jawa Posingin mengambil jalan tengah, namun cenderung memihak kepada pasangan capres-cawapres Jokowi-Amin.

Lain dengan Republika dan Jawa Pos yang memuat beberapa perangkat framing dan perangkat penalaran yang cenderung bernada positif ke salah satu pasangan calon sedangkan kepada pasangan calon yang lainnya bernada negatif, Kompas dalam pemberitaannya cenderung sangat berhati-hati dan berusaha untuk netral. Hal tersebut terbukti dari pemberitaan Kompas yang menghadirkan komparasi kedua pasangan calon dengan cukup obyektif. Dari pemilihan kata pada *headline*, pembahasan hingga *visual images* yang dihadirkan cenderung tidak memihak. Contoh, Harian Kompas terlihat sangat berhati-hati dalam menampilkan

perangkat framing seperti *Visual Image* kedua pasangan calon dalam pemberitaan mereka. Pada pemberitaan edisi 10-11 Agustus 2018 pasca deklarasi dan pendaftaran di KPU, Kompas memuat berita yang menjadi headline dengan judul “Dinamika Terakhir Menjadi Penentu” dan “Semua Kandidat Dorong Pemilu Damai”. *Visual Image* Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi yang dihadirkan pada pemberitaan kedua headline tersebut terlihat sepadan, mulai dari komposisi foto hingga gestur yang dihadirkan dalam foro tersebut.

b. Narasumber

Level ini menyoroti bagaimana hubungan media dengan lingkungan sekitarnya yang juga dapat mempengaruhi isi berita dalam mengkonstruksi fakta. Dalam hal ini adalah terkait pemilihan narasumber dari sebuah peristiwa pada berita. Keberagaman jenis surat kabar tentu berdampak terhadap keberagaman narasumber yang dimintai keterangannya oleh wartawan, sehingga hal tersebut berdampak terhadap perbedaan sudut pandang surat kabar dalam memberitakan suatu peristiwa ke dalam berita. Pemilihan narasumber dalam sebuah peristiwa biasanya akan mengikuti karakteristik dari surat kabar tersebut (Setiansah, 2009 : 45).

Dalam hal ini, Republika yang condong lebih menunjukkan keberpihakan pemberitaannya kepada Jokowi-Amin kerap kali menggunakan narasumber yang berasal dari kubu merekasendiri. Pemberitaan yang dimuat Republika lebih banyak dialokasikan untuk memuat hal positif dari kubu Jokowi-Amin yang diperkuat oleh argumen narasumber yang berasal dari koalisi mereka. Sedangkan pemberitaan mengenai koalisi Prabowo-Sandi mendapat ruang lebih sempit yang berdampak kepada narasumber yang dihadirkan ke dalam pemberitannya pun

tidak banyak. Sebagai contoh, dalam pemberitaan edisi Jumat, 10 Agustus 2018, *Republika* memuat 2 berita positif tentang Jokowi-Amin dan satu berita bernada negatif tentang koalisi Prabowo-Sandi. Keberpihakan *Republika* terlihat dari pemilihan narasumber pada dua berita yang didominasi oleh para petinggi partai yang berada di koalisi Jokowi-Amin, antara lain ialah Jokowi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, dan Mahfud MD. Sedangkan satu berita yang bernada miring mengenai isu mahar politik di kalangan kubu Prabowo-Sandi, *Republika* menggunakan narasumber yang berasal dari Partai PKS Ledia Hanifa dan Partai Demokrat Syarif Hasan. Narasumber yang berasal dari PKS merasa bahwa tuduhan mahar politik yang dilayangkan kader demokrat Andi Arief adalah fitnah keji dan dapat dikenakan sanksi hukum. Sedangkan narasumber dari Partai demokrat menyebutkan bahwa cuitan Andi Arief tersebut merupakan manifestasi ketidakpuasan terhadap keputusan Prabowo. Hal tersebut tentu berimbas negatif terhadap pasangan Prabowo-Sandi karena menimbulkan kesan gaduh di dalam koalisi Adil-Makmur.

Selain itu beberapa narasumber lainnya yang digunakan *Republika* adalah para pakar atau tokoh terkenal dari beberapa universitas Islam ternama di Indonesia, seperti Ujang Komarudin pengamat politik Universitas al-azhar Indonesia, pengamat politik islam Azyumardi Azra dan Tokoh GNPF Zaitun Rasmin.

Pemilihan narasumber dari kalangan tertentu juga masih dilakukan oleh *Jawa Pos*. Berita yang dihadirkan masih didominasi oleh pernyataan para petinggi partai koalisi Jokowi-Amin, meskipun tidak sebanyak yang dimuat oleh *Republika*. Hal tersebut tidak terlepas dari polarisasi politik tanpa poros ketika yang mengakibatkan tak hanya masyarakat yang terbagi menjadi dua golongan,

namun pemberitaan surat kabar juga seakan terbagi menjadi dua golongan sehingga muncul kalimat jika tidak pro Jokowi ya pro Prabowo dan begitu juga sebaliknya. Beberapa narasumber yang digunakan Jawa Pos antara lain pernyataan Joko Widodo, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Romahurmuziy, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Prabowo dan Sandiaga Uno. Jawa Pos melalui narasumber ini memperlihatkan beberapa klaim dari masing-masing kubu bahwa kubu koalisi merekalah yang solid dan lebih baik dibandingkan yang lain.

Sedangkan pemberitaan yang bersifat mengkritisi jalannya proses pencalonan capres-cawapres dari masing-masing kubu. Jawa Pos berusaha untuk berada di tengah walaupun biasanya tetap condong ke Jokowi-Amin. Pada pemberitaan yang berjudul “Kepentingan Parpol dan Kepentingan Logistik” Jawa Pos menggunakan pakar komunikasi politik Universitas Padjajaran yaitu Lely Arriane. Kritik yang disampaikan oleh Lely Arriane kepada kedua kubu koalisi dalam koran Jawa Pos cukup tajam dan objektif. Selain Lely, Jawa Pos juga menghadirkan Kepala Program International Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Dias Satria sebagai Narasumber pada pemberitaannya yang berjudul “Voters Muda Jangan Baperan” yang mana mengulas tentang momen pilpres sebagai momen penting dalam menentukan arah pembangunan Indonesia dan bagaimana voters pemula menanggapi momen tersebut.

Dalam pemberitaan Jawa Pos mengenai aturan kampanye dan maraknya penyebaran hoax, beberapa pihak yang mumpuni di bidang tersebut dijadikan sebagai narasumber pada pemberitaannya. Beberapa perangkat negara yang menjadi narasumber terkait aturan kampanye dan penyebaran hoax antara lain, Arif Budiman Ketua KPU, Brigjen M. Iqbal Divisi Humas Polri, dan Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy & Integrity (PADI) M. Zuhdan.

Jika dibandingkan dengan kedua surat kabar sebelumnya yaitu Republika dan Jawa Pos, Kompas adalah yang paling hati-hati dalam memframing pemberitaan mengenai pilpres 2019. Mulai dari pemkaian kata, penempatan *visual images*, serta penekanan isu dan pemilihan narasumber dalam berita. Di semua pemberitaan yang dimuat Kompas terkait pemberitaan pemilu presiden 2019 tidak satupun beritu yang menggunakan narasumber yang berasal dari satu kubu saja, Kompas konsisten menghadirkan narasumber yang beragam sebagai usaha untuk menjaga netralitas berita. Keberagaman narasumber berita-berita yang termuat di Kompas disajikan secara kontinyu. Dalam hal ini, Kompas menggunakan narasumber dari kalangan koalisi Jokowi-Amin, Jokowi-Sandi dan para pakar yang sesuai dengan tema berita yang dimuat. Sebagai contoh dalam pemberitaan Kompas yang menjadi headline edisi Sabtu, 11 Agustus 2018 yang berjudul “Semua Kandidat Dorong Pemilu Damai” menggunakan narasumber dari kubu Jokowi-Amin, Prabowo-Sandi, dan Dosen. Mereka antara lain, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Arif Budiman (Ketua KPU), Aviliani *Senior Institute For Develovement of Economics and Finances* (INDEF), dan Ninasapti Triaswati Dosen Ekonomi Pembangunan UI.

Sedangkan dari framing pemberitaan mengenai “Efek Ekor Jas Pemilu 2019”, Kompas menggunakan beberapa petinggi partai koalisi Jokowi-Amin maupun Prabowo-Sandi. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya peluang mendapatkan dampak ekor jas dari kedua capres-cawapres masih mungkin mengalir kepada seluruh partai politik pendukung pada masing-masing koalisi. Sedangkan untuk menakar dampak ekor jas terhadap perolehan suara elektoral perwakilan masing-masing partai pada pileg 2019, Kompas menggunakan beberapa literatur mengenai seberapa besar dampak ekor jas terhadap pileg yang

dilakukan secara serempak tersebut. Beberapa literatur yang dijadikan acuan oleh Kompas antara lain Heather Stoll dalam *“Presidential Coattai: A Closer Look”* yang dimuat dalam jurnal *Party Politics* (2015) menyebutkan bahwa pemilihan presiden memberikan efek “tarikan” bagi pemilihan legislatif karena kampanye pemilihan presiden menarik perhatian media nasional, kandidat legislatif, elite politik, dan juga para pemilih. Selain itu Kompas juga menghadirkan narasumber yaitu Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Subakti dan juga Koordinator Tata Kelola Pemilu Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando. Menurut Kompas, hal tersebut menjadi sangat penting untuk dimuat karena pilpres 2019 adalah sejarah dan pertama kali dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif.

2. Level Ideologi Media

Pamela J. Soemaker dan Stephen D. Reese mengatakan bahwasanya ideologi adalah inti pikiran yang bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Ia tidak stagnan dan berubah sesuai dengan keadaan di mana ia berada karena ideologi muncul dan bertahan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dalam media, adanya kerangka pikir ini mengisyaratkan bahwa ada hal-hal yang telah terbentuk dan menjadi benang merah dalam setiap proses pembuatan beritanya. Ideologi dalam media diibaratkan sebagai koridor, penunjuk arah maupun garis batas yang nantinya akan menjadi pembeda antara satu media dengan media lainnya (Reese, 1996 : 212-213).

Perbedaan ideologi yang dianut oleh masing masing media tentu sangat berpengaruh terhadap pengemasan hingga isi dari berita yang dihasilkan oleh media. Republika yang hadir dengan menganut ideologi kebangsaan, kerakyatan dan keislamannya menyajikan berita yang kental dengan gaya islami dengan

wajah yang moderat (Romadhonita, 2014 : 282). Maka wajar saja dalam hal pemberitaan pilpres 2019 ini, Republika lebih menonjolkan sisi keislaman dan ulama dari kedua kubu. Beberapa narasi bernada positif mengenai keislaman dan ketokohan dari seorang Ma'ruf Amin kerap dimuat oleh Republika. Pasca pendeklarasian cawapres oleh masing-masing kubu, Pada tanggal 10 Agustus 2018 Republika memuat berita yang menjadi *headline* "Kandidat Siap Mendaftar" dengan memuat ketokohan dan keulamaan Ma'ruf Amin sebagai figur yang cocok untuk berpasangan dengan capres Joko Widodo. Republika memuat *Metaphors* "Nasionalis Religius" untuk menggambarkan duet Jokowi yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan figur Ma'ruf Amin yang kental dengan nuansa religius. Selain itu penonjolan tokoh Ma'ruf Amin juga terlihat dari berita yang berjudul "Kiai Ma'ruf Prioritaskan Ekonomi Umat" yang memuat pemberitaan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan Ma'ruf Amin ketika terpilih menjadi wapres nantinya.

Kemasan berita yang dihadirkan Republika juga mencerminkan ideologi yang dianutnya. Pada pemberitaan pasca pendaftaran ke kantor KPU, Republika menulis berita yang sangat kental dengan *style* islami, salah satu contohnya ialah Republika memuat suasana ketika kedatangan masing-masing kedua kubu yang diiringi oleh shalawat badar dan alunan musik rebana, dan peristiwa ini tidak sedikit pun dimuat di Kompas maupun Jawa Pos. Satu hal yang menjadi titik fokus pemberitaan Republika mengenai konstelasi pilpres 2019 adalah dual fungsi ulama sebagai tokoh agama yang juga merangkap sebagai umara. Berita pada tanggal 11 Agustus yang berjudul "Musim Semi Ulama Indonesia" dan 14 Agustus 2018 yang berjudul "Ulama Terjuan Karena Politisi Gagal Menyejahterakan". Dari beberapa berita yang disuguhkan, pemilihan kata dan

gaya pemberitaan yang dimuat Republika sudah mewakili ideologi yang dianutnya.

Dalam Jawa Pos, isu religiusitas bukan menjadi prioritas pemberitaan mereka. Ideologi Jawa Pos yang memilih jalan kapitalis alias mengikuti kemauan pasar mem-framing kontestasi demokrasi pilpres 2019 dari sudut pandang yang berbeda (Romadhonita, 2014 : 282). Ideologi yang diamini oleh Jawa Pos tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap pemilihan judul, isi berita dan penonjolan aspek-aspek tertentu mengenai pilpres 2019. Sebagaimana yang dapat kita jumpai di sepanjang pemberitaan periode 10-16 Agustus 2018, Jawa Pos membuat judul berita yang menarik dan mengundang minat baca. Sebagai contoh, Jawa Pos menulis berita berjudul pengumuman cawapres penuh drama, kepentingan parpol vs kebutuhan Logistik, voters muda jangan baperan, dan lain-lain.

Jawa Pos memuat beberapa berita yang mengkritisi perjalanan kedua koalisi dalam menghadapi kontestasi politik pilpres 2019 ini. Jawa Pos lebih memfokuskan pemberitaannya kepada dinamika yang terjadi pada kedua kubu koalisi yakni Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi. Misalnya, Jawa Pos mengupas secara mendalam dinamika pemilihan cawapres yang terjadi pada masing-masing koalisi, secara tegas Jawa Pos mengkritisi dominasi kepentingan parpol koalisi pada kubu Jokowi yang berdampak terhadap keputusan Jokowi dalam menentukan figur yang dipilih menjadi cwapresnya. Pada pemberitaan Jawa Pos edisi 10 Agustus 2018, mereka memuat *Appeals to Principle* atau premis dasar yaitu “Kepentingan partai koalisi jauh lebih dominan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan parpol masih bertengger di atas kepentingan yang lainnya.

Disamping itu Jawa Pos juga mengkritisi perihal dipilihnya Sandiaga Uno oleh Prabowo yang didukung oleh beberapa parpol koalisi sedangkan parpol lainnya belum setuju atau belum menyatakan sikap terhadap pilihan Prabowo tersebut. Adalah Partai Demokrat menjadi satu-satunya parpol koalisi Prabowo yang hingga mendekati batas pendaftaran masih bersikap abu-abu terhadap keputusan ketua koalisi. Hingga akhirnya, Partai Demokrat menyatakan diri untuk mendukung Prabowo-Sandi sebagai capres-cawapres di pilpres 2019 dengan beberapa pertimbangan politik. Jawa Pos membingkai hal tersebut salah satunya dengan memuat *Catchphrase* atau Frasa yang menarik dan menonjol yaitu “Politik *by design*, bukan *by Accident*”. Hal tersebut digunakan Jawa Pos untuk menggambarkan kondisi koalisi yang belum seratus persen menyatakan sikap dukungan terhadap Prabowo-Sandi. Selain itu, Jawa Pos juga memuat *Appeals to Principles* pada pemberitaannya terkait terpilihnya Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo dengan menulis frasa yang berbunyi “Di tengah partai yang *nggak* mau keluar biaya, Sandi punya”. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi logistik dalam koalisi Prabowo sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan operasional kampanye dan kebutuhan lainnya.

Berbeda dengan Republika dan Jawa Pos, Kompas yang menempatkan Falsafah kemanusiaan yang beriman kepada (Humanisme transendental) mengarahkan fokus perhatian pemberitaan kepada nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok tertentu. Maka dalam setiap pemberitaannya Kompas biasanya menggunakan kata yang lentur dan tidak frontal, namun lebih kepada bahasa yang menyangkut emosi dan perasaan pembacanya (Wulandari, 2012 : 154). Falsafah yang dianut oleh Kompas memberi pengaruh terhadap isi pemberitaan yang dimuatnya, tak terkecuali

mengenai isu-isu politik seperti pilpres 2019 ini. Judul-judul berita yang ditulis Kompas tidak pernah menyerang individu atau kubu tertentu, ia berusaha untuk menampilkan pemberitaan yang mengkritisi tanpa pandang bulu. Begitu juga dengan beberapa framing yang dimuat oleh Kompas seperti *Visual Images*, *metaphors catchphrase* dan lain-lain berusaha ditampilkan seobyektif mungkin.

Sebagai contoh, Kompas edisi 10 Agustus 2018 menerbitkan berita dengan judul “Dinamika Terakhir Menjadi Penentu”. dengan menghadirkan *Visual Images* Jokowi dan beberapa petinggi partai koalisi serta Prabowo bersama beberapa petinggi partai koalisinya. Dalam pemberitaan ini Kompas membagi beritanya menjadi dua bagian, bagian pertama diberi sub judul “Menerima” untuk menggambarkan kondisi Mahfud MD yang gagal bersanding sebagai cawapres Jokowi. Kata “Menerima” tersebut mewakili sikap seorang Mahfud MD yang legowo dan menerima keputusan bahwa Ma’ruf Amin lah yang terpilih menjadi Cawapres Jokowi. Sementara bagian yang kedua diberi sub judul “Mundur” yaitu ditulis Kompas untuk menggambarkan sikap Sandiaga Uno yang harus melepas jabatannya sebagai wagub Jakarta dan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra agar bisa melaju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di awal pemberitaan, Kompas memuat *Metaphors* dengan menulis “keputusan kedua kubu dalam menentukan cawapresnya menunjukkan praktek politik di Indonesia yang cenderung pragmatis”. Selain itu, Kompas juga memuat *Exemplars* perihal Partai Demokrat yang belum menentukan arah koalisi dengan menulis “Partai Demokrat menjadi satu-satunya parpol pemilik kursi di DPR yang hingga semalam (Kamis, 9 Agustus 2018) pukul 23:45 belum menyatakan dukungannya di pilpres”.

Di samping itu, Kompas dengan visi misi yang ingin mendidik dan mencerahkan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, menghadirkan berita yang

merangsang pembacanya untuk mempelajari dampak “ekor jas” dari pemilu 2019. Hal tersebut dianggap penting oleh Kompas karena pemilu 2019 ini adalah pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia yang dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, Kompas mengulas pemberitaannya secara mendalam mengenai dampak “ekor jas” dari kedua kubu Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi pada pemilu 2019 dengan menulis berita berjudul “Strategi Para Pemburu Efek Ekor Jas” dan “Menakar Dampak Ekor Jas”. Beberapa perangkat framing dan perangkat penalaran dimuat di dalam dua berita mengenai efek ekor jas pemilu tersebut, salah satunya Kompas menulis Depiction dengan menulis frasa “Para Pemburu” yang mana diartikan sebagai elite partai politik pendukung capres-cawapres Jokowi-Amin maupun Prabowo-Sandi yang mencari keuntungan dari figur kedua pasangan capres-cawapres. Sedangkan “Efek Ekor Jas” tersebut adalah leksikon yang digunakan Kompas untuk menggambarkan sesuatu yang menjadi incaran para pemburu tersebut yakni memperoleh hubungan positif antara kekuatan elektoral capres-cwapres terhadap pendulangan suara parpol pendukung yang berkompetisi di pemilu legislatif. Framing berita mengenai dampak ekor jas politik 2019 inimenjadi pembeda antara ketiga koran tersebut karenahanya dimuat oleh Kompas dan tidak ditemui pada pemberitaan Republika maupun Jawa Pos.